

Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow

*Camila Melisa Woran¹
Agustinus Pati²*

Email Korespondensi: melisaworan01@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Sumber konflik didaerah dapat dipicu oleh beragam kondisi dibesarkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan dan kebutuhan kelompoknya. Akumulasi klaim kepentingan antar pribadi dan kelompok masyarakat didaerah konflik yang tidak mampu diselesaikan secara baik, mengakibatkan perluasan integritas masalah dari isu yang sebelumnya kecil manjad isu yang besar yang merebak dan menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat. Ironisnya, tawuran tersebut sering kali menimbulkan korban jiwa, luka berat, Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu sehingga tindakan tersebut tidak bisa di tolerir lagi, tawuran yang notabenenya dilakukan oleh remaja itu sangatlah merugikan masyarakat karena sangat mengganggu ketertiban dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Strategi Pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di kecamatan Dumoga barat kabupaten Bolaang Mongondow masih dianggap belum efektif hal ini terlihat bagaimana konflik antar kelompok/ desa yang masih sering terjadi tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah setempat, sistem penangan konflik dianggap menjadi kendala karena masih minimnya pemahaman mayoritas aparaturn pemerintah dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat

Kata Kunci: Kepemimpina, Lurah, Ketentraman, Ketertiban Umum

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Pendahuluan

Terjadinya tawuran dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan barang di sekitar tempat kejadian. Alhasil tawuran antar warga membuat takut dan cemas masyarakat. Terjadinya tawuran antar warga sudah pada taraf membahayakan. Terjadinya tawuran diawali dari hal-hal yang sepele, seperti saling mengejek, membela teman yang punya masalah pribadi dengan warga lain di luar, mabuk-mabukan kemudian meluas hingga menjadi konflik antar kelompok atau warga. Peristiwa tawuran antar desa di kecamatan Dumoga Barat sudah beberapa kali terjadi di tahun ini, apa lagi pada saat bulan Ramadhan yang di picuh karena dendam lama atau masalah yang timbul karena kesalah pahaman. Peristiwa tawuran antar warga antara desa Doloduo dan desa Kosio yang bisa menimbulkan korban luka-luka dan kerusakan serta korban jiwa. Tawuran ini tentunya harus diselesaikan dan tidak dibiarkan berlangsung terus menerus karena akan mengganggu masyarakat. Akibat dari Tawuran itu sendiri adalah dapat menimbulkan korban luka-luka bahkan korban jiwa.

Sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengenai tugas pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten/ kota yang ujung tombaknya adalah kecamatan, camat dan aparatnya belum menjalankan secara maksimal amant dari Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Camat mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Camat mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada pasal 17 disebutkan Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pemerintah daerah mempunyai urusan pemerintahan konkuren dan terdiri dari 2 urusan yakni urusan wajib dan pilihan,

Keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat hal diatas dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat 1 bagian b disebutkan kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dari beberapa peristiwa yang terjadi di Kecamatan Dumoga barat tersebut yang terbaru adalah tawuran antar desa doloduo dan desa kosio yang disebabkan oleh dendam, mabuk dan kenakalan remaja, peneliti melihat bahwa seharusnya pemerintah khususnya pemerintah kecamatan telah memiliki strategi dalam mengatasi konflik tersebut, mengingat kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi. Dengan adanya peran pemerintah kecamatan, maka diharapkan peristiwa yang serupa tidak terjadi lagi, namun kenyataannya pada tahun 2022 ini peristiwa tersebut masih terjadi. Sejauh ini peneliti melihat langkah pemerintah kecamatan baru sebatas upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai dengan melibatkan anggota kepolisian dan TNI.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif.

Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemerintah Kecamatan
- b. 2 Pemerintah Desa
- c. Pihak Kepolisian Sektor
- d. Pemuda
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Masyarakat

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- Observasi;
- wawancara; dan
- Pengumpulan data melalui dokumen

peneliti menetapkan suatu focus dalam penelitian mengenai strategi pemerintah

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kecamatan dalam penanganan kasus tawuran antar desa di kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan teori Menurut Iman Mulyana (2010:45), Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi namun yang digunakan hanya 3 sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu :

1. Kemampuan
2. Sumber Daya
3. Lingkungan

Pembahasan

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka

tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan. Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian dalam sebuah wilayah terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa pada wilayah tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian.

Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat. Perkelahian dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor luar bisa memicu perkelahian itu terjadi. Bila dilihat dari pola kemiskinan yang mendera di Kabupaten Bolaang Mongondow, peran pemerintah tentunya tidak lepas dari situ. Mendistribusikan kekayaan secara adil adalah bagian tugas dari pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya. Namun yang tampak jelas pada beberapa kecamatan dengan rasio peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ternyata diikuti dengan jumlah penduduk miskin ketika pembangunan infrastruktur modern begitu cepat memenuhi wilayah tersebut.

Penduduk tentunya akan mendatangi tempat yang baru tersebut, sebagai asumsi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Istilah *to caddi* bagi masyarakat miskin keluar sebagai bentuk penerimaan nasib yang mereka alami. Mereka pun mengakui pengusaha, pemilik modal, pejabat pemerintah sebagai orang besar yang sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan keluarga miskin yang tersebar di kecamatan lainnya. Pemerintah semestinya memiliki program untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi termasuk perkelahian antar kelompok yang merebak di masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Peneliti tidak memasukkan lembaga peradilan sebagai representasi yudikasi di

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

negeri ini mengingat perkelahian antar kelompok sangat sulit untuk diadili karena banyaknya jumlah orang yang terlibat. Oleh karena itu peneliti menggantikan peran tersebut dengan memasukkan kepolisian resort yakni Polres dalam upayanya menangani tidak kekerasan massa namun tidak penjabaran mengenai perannya hanya dimasukkan dalam pembahasan diantara dua bagian pemerintah dalam skala besar tadi. kecamatan dengan pihak kepolisian untuk bahu membahu menangani kasus perkelahian antar kelompok ini.

Perkelahian dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor luar bisa memicu konflik serta perkelahian antar kelompok yang di dominasi oleh pemuda khususnya di Desa Kosio barat dan desa Doloduo 3., peran pemerintah tentunya tidak lepas dari situ. Mendistribusikan kekayaan secara adil dan menciptakan kegiatan yang berdampak positif seperti pemberdayaan masyarakat adalah bagian tugas dari pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya.

Dari hasil wawancara dengan informan sangadi Desa Kosio Barat Ibu. Agustina Tundo dimana beliau mengatakan bahwa dalam penanganan kasus tawuran antar desa ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi, teguran kepada masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya mereka turut melibatkan aparat kepolisian, para perangkat desa, kecamatan dan juga pihak TNI dalam menanganai apabila terjadi kasus tawuran.

Menurut sangadi Kosio barat, kebanyakan penyebab karena minuman keras dan juga hal-hal sepele yang berujung pada tawuran kelompok bahkan desa. Hal senada dikatakan oleh Sangadi dari desa Doloduo 3 dimana strategi beliau dalam penanganan kasus tawuran adalah dengan mengadakan patrol dan juga menegur masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras.

Konflik antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Dumoga barat yang melibatkan dua kelompok desa setempat

yakni Desa Kosioo barat dan Desa Doloduo 3 memang perlu perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, tanpa penanganan yang serius akan memicu pecahnya kembali suatu konflik walaupun hanya berskala kecil namun hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Fungsi Pemerintah daerah, tentunya segala program menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Menurut Camat kecamatan Dumoga barat, salah satu tugas pemerintah daerah ialah menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan pola tindakan yang dilakukan lebih dalam dijelaskan bahwa kantor kecamatan yang dipimpinnya itu lebih bersifat konsep dan preventif selanjutnya dalam penerapan di lapangan terkait bila peristiwa perkelahian berlangsung maka itu merupakan tugas dari kepolisian.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah Desa Kosio barat dan desa doloduo 3 serta beberapa desa yang terkait beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para kelompok yang terlibat konflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, dimana diharapkan mampu meredam munculnya kembali konflik. Terbukti setelah beberapa kali diadakan perdamaian, konflik kembali terjadi.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum begitu maksimal dalam menyelesaikan Konflik tersebut, terbukti bahwa pemuda desa Kosio barat dan Desa Doloduo 3 masih saja terus berkonflik. Lebarnya persoalan konflik dengan kemampuan pemerintah yang terbatas untuk menyelesaikannya apalagi dengan metode yang kurang tepat sering bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik Berdasarkan pernyataan tersebut harus dibangun bagaimana cara penyelesaian konflik yang muncul dari bottom-up yang secara damai dan melibatkan semua pihak.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Dalam strategi manajemen konflik ini dibutuhkan pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menterjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan Dumoga barat, sebagai fasilitator harus bersifat netral agar masing- masing pihak baik dari kelompok Desa Kosio Barat maupun Desa Doloduo 3 dapat menerima hasil yang telah disepakati.

Penutup

Kesimpulan

Dari aspek komunikasi terkait Dimensi Strategi Pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di kecamatan Dumoga barat kabupaten Bolaang Mongondow masih dianggap belum efektif hal ini terlihat bagaimana konflik antar kelompok/ desa yang masih sering terjadi tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah setempat, sistem penangan konflik dianggap menjadi kendala karena masih minimnya pemahaman mayoritas aparat pemerintah dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Faktor yang mendukung dalam penyelesaian konflik antara kelompok di kecamatan Dumoga barat kabupaten Bolaang Mongondow yaitu resolusi konflik dimana pemerintah daerah berusaha membangun hubungan baru diantara kelompok-kelompok yang berseteru kemudian melalui manajemen konflik dengan melakukan pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan yang terakhir yakni melalui negosiasi dengan melakukan suatu proses duduk bersama dalam penyelesaian konflik.

Saran

1. Perlu adanya melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan

munculnya urung rembuk dalam pihak yang bertikai. Dimungkinkan dari sini akan terdapat pengambilan keputusan. Pemerintah kecamatan atau setidaknya bagian terkecil hingga tingkatan tokoh masyarakat merupakan lembaga yang paling cocok untuk memainkan peran ini.

2. Pihak ketiga sebagai bagian yang melihat konflik dengan kaca mata berimbang sangat berguna untuk memunculkan *win-win solution*. Bentuk ini juga sebaiknya dimainkan oleh pemerintah kecamatan tanpa harus memperlambat langkah dengan memainkan struktur pemerintahan terdekat dari wilayah konflik.
3. Diharapkan kepada aparat pemerintah daerah benar-benar mampu menguasai proses penyelesaian berdasarkan prosedur serta perundang- undang yang berlaku, halinipenting agar dalam penyelesaian konflik dapat mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat
4. Diharapkan kepada Kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat kiranya mampu selalu berkordinasi dan bekerjasama dalam mengamati setiap permasalahan dalam lingkungan masyarakat sehingga setiap adanya permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara damai.

Daftar Pustaka

- Andrew D. J. 2015. *Leadership* (Terjemahan). Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.
- Bungin Burhan, 2001, *Metode Penelitian Sosial :Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press,Surabaya.
- Dom Helder. *Spiral Kekerasan*. Resist Book. Yogyakarta.2005
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007
- Garna, Judistira K., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, The Judistira Garna Foundation and Primaco Akademika Bandung: Bandung
- Kartini,Kartono. *Kenakalan Remaja*

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

(Patologi sosial 2). Rajawali Press.

Jakarta.2010

ISSN: 2337 - 5736

- Kuncoro, Mudrajad 2016. Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexi J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarta.
- Mulyana, Iman. 2010. Manajemen dan Kehidupan Manusia. Yogyakarta: Kanisius.
- Ritzer dan Goodman. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Jakarta. 2010
- Salusu. J. 2016. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, 2009: 212-213, *peranan sosiologi*. Suatu pengantar, Edisi Baru, Rajawali, Pers, Jakarta.
- Sutopo. 2002. Metode penelitian kualitatif . UNS Press, Solo
- Suharto, Edy. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Refika Aditama. Bandung 2009.
- Sunardi, Keselamatan kapitalisme dan kekerasan, LKIS, Yogyakarta, 1996
- Suryaningrat. B. 2009. Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Edisi revisi. Jakarta. PT. Gunung Agung.
- Wahyudi & H. Akdon. 2005. Manajemen konflik dalam organisasi. Bandung: Alfabeta

Sumber Lainnya:

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Penyebab tawuran antar warga. 10 Maret 2016. <http://firstyavishasepti.blogspot.co.id/2013/05/penyebab-tawuran-antar-warga-di-tiap.html>
- Makalah Dampak Sosial Tawuran Antar Warga. 10 maret 2016. <https://makalah-dampaksosial-tawuran-antar-wilayah-rtrt-di-jakarta/>